

**PENGARUH PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S, Akun)



Disusun Oleh :

DAMIYAN HAIDAR ATHA

NIM. 4317035

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

**PENGARUH PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S, Akun)



Disusun Oleh :

DAMIYAN HAIDAR ATHA

NIM. 4317035

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damiyon Haidar Atha

NIM : 4317035

Judul Skripsi : Pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi
Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



DAMIYAN HAIDAR ATHA
NIM 4317035

NOTA PEMBIMBING

H. Muhammad Nasrullah, M.S.I

Jl. Hasyim Ashari RT 04/02 Kemplong

Wiradesa Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdr. Damiyan Haidar Atha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Abdurrahman Wahid

c.q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Damiyan Haidar Atha**

NIM : **4317035**

Judul : **Pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang**

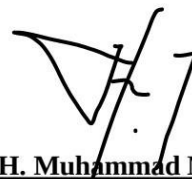
Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Oktober 2022

Pembimbing



H. Muhammad Nasrullah, M.S.I
NIP 19801128 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Damiyan Haidar Atha**

NIM : **4317035**


Judul Skripsi : "**Pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas dan
Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan
Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang**"

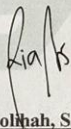
Telah diujikan pada Senin, 31 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji 1

Penguji 2


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M. H.
NIP. 197502201999032001

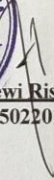

Ria Anisatus Sholihah, S. E., Ak., MSA, CA
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M. H.
NIP. 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Seluruh keluarga saya tercinta, terutama Bapak dan Ibu saya tercinta yaitu Bapak Harry Bodyono dan Ibu Margiasih, yang telah tulus ikhlas mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, yang selalu mendo'akan untuk kebaikan dan kesuksesan saya, serta kedua adik saya Deliyah Rahadya Firza dan Divyazeti Amira Hessa yang selalu memberikan semangat.
2. Bapak Ade Gunawan M.M., Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A., Bapak H. Gunawan Aji, M.Si, dan rekan-rekan mahasiswa AKSYA angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, S.E., M.Si. Ak. CA selaku Dosen Penasehat Akademika (DPA).
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Muhammad Nasrullah M. S. I dan penguji selama proses skripsi.
5. Teman-teman jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2017.
6. Calon saya Nur Hayati yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

“ Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil.

Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki “

Mahatma Ghandi

ABSTRAK

DAMIYAN HAIDAR ATHA. Pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui adanya pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. sedangkan sampel yang diambil sejumlah 72 jiwa dari perwakilan organisasi per masing-masing desa yakni RT, RW, Karang Taruna dan Badan Pengawas Desa (BPD). Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalitas berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Dana Desa; Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan Dana Desa dan Transparansi berpengaruh terhadap Penggunaan Dana Desa. Adapun untuk Uji F menghasilkan tingkat signifikansi 0,000 dibawah 0,05, artinya bahwa secara simultan variabel Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap variabel Penggunaan Dana Desa. Angka *Adjusted R Square* pada model diperoleh sebesar 0,568. Hal ini berarti 56,8% variabel Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi sedangkan sisanya yaitu 43,2% variabel Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

Kata kunci : Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

DAMIYAN HAIDAR ATHA. The Influence of Professionalism, Accountability, and Transparency on the management of village funds in Warungasem District, Batang Regency

Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for Traditional Villages and Villages which are transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development, as well as community and community empowerment. This study aims to Knowing the influence of Professionalism, Accountability and Transparency on Village Fund Management in Warungasem District, Batang Regency

This research is included in the type of quantitative research using a descriptive approach. Determination of the sample using purposive sampling method. while the samples taken were 72 people from organizational representatives per each village namely RT, RW, Karang Taruna and Village Supervisory Board (BPD). The analysis used is multiple linear regression.

The results of the study indicate that professionalism has a significant effect on the use of village funds; Accountability has a significant effect on the Use of Village Funds and Transparency has an effect on the Use of Village Funds. As for the F-test, it produces a significance level of 0.000 below 0.05, meaning that simultaneously the variables of Professionalism, Accountability and Transparency have a significant effect on the Variable Use of Village Funds. Figures Adjusted R Square in the model obtained by 0.568. This means that 56.8% of the Village Fund Management variable can be explained by the variables of Professionalism, Accountability and Transparency while the remaining 43.2% of the Village Fund Management variable can be explained by other variables not examined in this study.

Keywords: Professionalism, Accountability, and Transparency, Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat taufik hidayah serta inayah-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 jurusan Akuntansi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah serta Rezeki berupa kesehatan yang luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ade Gunawan, M.M, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak H. Muhammad Nasrullah, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak H. Ahmad Rosyid, S.E., M.Si. Ak. CA selaku Dosen Penasehat Akademika(DPA)

9. Segenap Dosen dan staff FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama jurusan AKSYA.
10. Orang tua, keluarga besar, sahabat, teman teman seperjuangan AKSYA 17 yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 September 2022

Penulis



Damiyan Haidar Atha
4317035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Agensi.....	13
2. Profesionalitas	15
3. Akuntabilitas	17
4. Transparansi	18
5. Dana Desa	20
6. Tujuan dan Manfaat Dana Desa.....	23

7. Pengelolaan Keuangan Desa	24
B. Telaah Pustaka	30
C. Kerangka Berpikir	38
D. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Variabel Penelitian	48
F. Sumber Data.....	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskriptif Responden.....	58
B. Analisis Kualitas Data.....	60
C. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Keterbatasan Penelitian.....	80
C. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Debi, 2015).

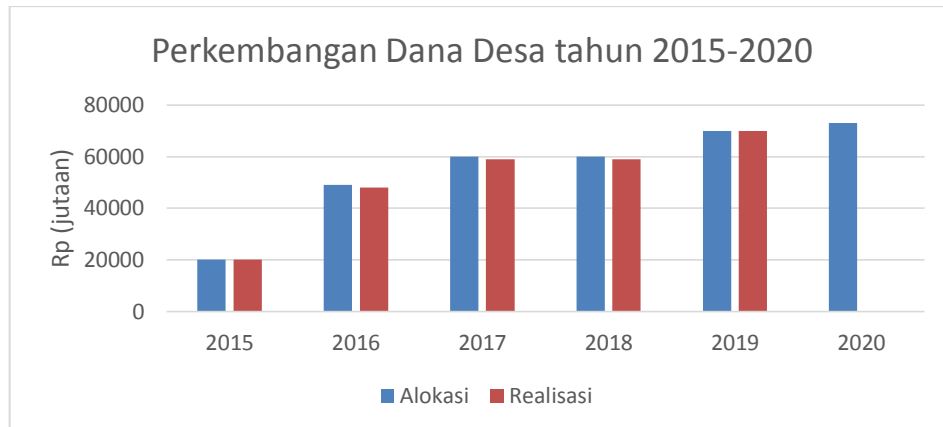
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan

alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. (Peraturan Pemerintah, 2014).

Pada Tahun 2015 adalah awal mulanya Indonesia mengucurkan program adanya Dana Desa sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Dana Desa diharapkan mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah, 2014).

Perkembangan Dana Desa dari tahun 2015 – 2020 dilansir dari Laporan DPR RI Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

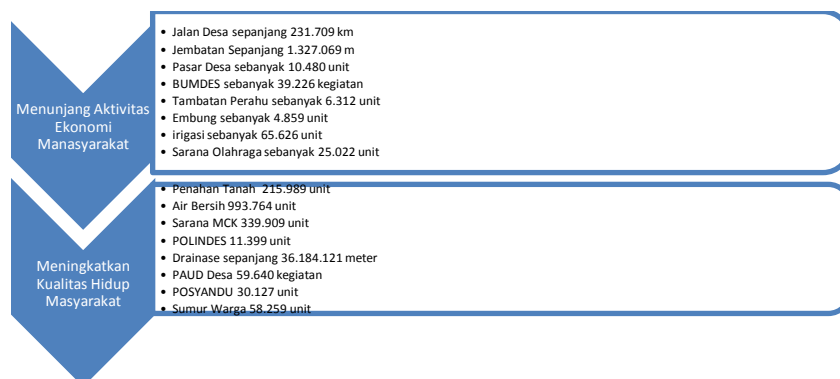
Tabel 1.1
Perkembangan Dana Desa



Sumber : Nota Keuangan Negara dan LKPP, 2021.

Selama kurun waktu 2015-2019 pemanfaatan dana desa telah menghasilkan capaian yang menunjang perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana di desa.

Gambar 1.2
Pemanfaatan Dana Desa



Sumber : Wartaindo.News

Dari gambar 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa Dana Desa sudah dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar dan lain sebagainya. Selain itu, Dana Desa juga telah dimanfaatkan untuk menambah pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Polindes, Sarana Air Bersih, MCK, Drainase dan lain-lain (Peraturan Pemerintah,2014).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penyaluran Dana Desa dinilai berbeda dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri karena desa memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri pengelolaan desanya. (Peraturan Pemerintah, 2014).

Namun demikian, fenomena atau *issue* yang terjadi di lapangan menunjukkan masih adanya pihak pihak yang melakukan penyelewangan terhadap Dana Desa ini, rata – rata kasus ini menyeret Kepala Desa

sebagai aktor nya, contoh saja Pada Oktober 2021, di Jawa Tengah ada beberapa desa yang tidak terealisasi, karena permasalahan hukum. “ Misalnya kepala desa bermasalah dengan hukum, sehingga tidak bisa mempertanggungjawabkan dan dampaknya pada realisasi penyaluran atau penyerapan dana desa. Yang telah merealisasikan 100 persen itu baru sekitar 7.794 desa dan sisanya merealisasikan ada yang 80-90 persen. Bahkan ada yang baru merealisasikan 50-60 persen, karena ada permasalahan hokum” (Putra, 2019).

Bulan Agustus 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan dan kemudian menetapkan tersangka Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudy Indra, dan Kepala Desa Dasok, Pamekasan, Agus Mulyadi. Nama-nama di atas tersangkut korupsi atas dugaan suap terhadap penegak hukum terkait penyelewengan dana desa sebesar Rp 100 juta. Sebelumnya kasus penyelewengan dana juga terjadi di Jawa Timur. Kepala Desa Kranggan, Madiun, Jawa Timur diproses secara hukum karena menggunakan dana desa untuk membayar cicilan utang pribadinya (Gitiyarko, 2015).

Kasus-kasus korupsi Dana Desa diakibatkan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut dapat menimbulkan peluang untuk melakukan penggelapan uang rakyat sehingga ke depannya diharapkan agar penyaluran Dana Desa

benar-benar diawasi dan dikelola oleh pihak yang berwajib dan bertanggung jawab (Gitiyarko, 2015).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terdapat tujuh asas-asas yang harus diterapkan oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 24 yaitu: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas, Efektifitas dan efisiensi, Kearifan local, Keberagaman & Partisipatif (Peraturan Pemerintah, 2014).

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah desa juga wajib menjalankan asas profesionalitas sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Profesionalitas juga diperlukan agar pemanfaatan alokasi dana desa dapat berjalan maksimal dengan aparatur desa yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan dana desa tersebut baik dalam pembuatan program maupun administrasi desa yang berkaitan dengan alokasi dana desa (Debi, 2015)

Selain profesionalitas, salah satu asas lain yang harus diterapkan oleh pemerintah desa adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menggariskan bahwa siapa pun adanya, apakah dia perseorangan maupun lembaga, yang diberikan wewenang oleh publik, memakai dan menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, serta melakukan tugas yang berpengaruh kepada kehidupan publik, maka dia harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada publik terhadap

segala sesuatu yang mereka gunakan. Tanpa adanya pertanggungjawaban, maka kekuasaan intitusi publik akan sangat mungkin untuk menjadi omnipotent (berkuasa sangat mutlak), omnipresnt (menguasai segala hal) dan ominous (sangat jahat atau menyebalkan) bagi masyarakat (Debi, 2015).

Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi hak dan wewenang (rakyat) dengan yang diberi hak dan wewenang berlangsung secara adil (Setiyono, 2018). Profesionalitas dan akuntabilitas tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan keahlian dan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pelaksanaan program dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang belum menerapkan asas profesionalitas dan akuntabilitas secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi (Setiyono, 2018).

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. (Muntaha, 2013). Melihat dari juklak ini dana desa yang digelontorkan untuk Desa cukup besar, agar dapat terlaksana dengan baik. Maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dikelola dari sudut pandang Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi dengan baik.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debi (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerryan (2015) menyatakan Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Siregar akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Debi (2015), Gerryan (2015) transparansi berpengaruh Signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Supamo (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi Pemerintah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Profesionalitas, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kec. Warungasem Kab. Batang).***

B. Rumusan Masalah

Menunjuk latar belakang yang ada, bisa munculkan rumusan permasalahannya adalah :

1. Apakah Profesionalitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

4. Apakah Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu permasalahan yang diuraikan, tujuan penelitiannya yang diharapkan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Profesionalitas terhadap Pengelolaan Dana desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variable Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi khususnya dalam Pengelolaan Dana Desa.
 - b. Menambah wawasan khususnya tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Bagi Pembaca, Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap pembaca mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Warungasem serta berbagai aspek yang mempengaruhinya.
- c. Bagi Masyarakat, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Warungasem.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Pembahasan ini tersusun dalam lima bab, dengan sistematika Pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa

penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji pengaruh secara parsial (uji t) di dapatkan nilai t signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$ dengan nilai koefisien β_1 sebesar 0,550. Dengan demikian, Variabel Profesionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.
2. Hasil uji pengaruh secara parsial (uji t) di dapatkan nilai t signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai koefisien β_2 sebesar 0,476. Dengan demikian, Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.
3. Hasil uji pengaruh secara parsial (uji t) di dapatkan nilai t signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dengan nilai koefisien β_3 sebesar 0,873. Dengan demikian, Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa.
4. Hasil dari uji F pada model tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Dengan demikian variabel Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
Pengelolaan Dana Desa.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan-keterbatasan. Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

1. Sampel yang digunakan masih sedikit (di bawah 100 responden) yaitu sebesar 72 responden.
2. Objek penelitian terbatas pada satu perwakilan organisasi desa
3. Variabel yang digunakan terbatas hanya pada 3 variabel Independen (Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transparansi) dan 1 variabel Dependen (Pengelolaan Dana Desa).

C. Saran

Saran-saran yang dapat diambil dari penelitian saat ini agar penelitian-penelitian ke depan menjadi semakin lebih baik adalah :

1. Sampel yang digunakan menggunakan sampel dengan jumlah lebih besar (lebih dari 72) agar hasil penelitian menjadi lebih tepat.
2. Objek penelitian sebaiknya tidak bersumber hanya pada satu orang perwakilan organisasi desa saja melainkan dengan melibatkan banyak pihak terutama para pamong desa dan tokoh-tokoh masyarakat agar hasil yang didapatkan lebih optimal.
3. Agar data penelitian lebih akurat dan untuk mengurangi ketidakjujuran responden, sebaiknya sediakan souvenir untuk responden yang menjawab dengan jujur.

4. Peneliti selanjutnya bisa mengambil variable lain selain variable Profesionalitas, Akuntabilitas dan Transpansi. misalnya seperti variable Agilitas dan Kepuasan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Smith dan Govindarajan. *Management Control System*. Edisi 11, penerjemah F.X. Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta : Salemba Empat, Buku 2.
- Astuti, Titiek Puji. 2016. *Good Governance Pengelolaan Dana Desa Menyongsong berlakunya UU No.6 tahun 2014*. Jurnal Akuntansi Pembaruan Vol. 2 No. 3.
- Debi Putri Pertiwi. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau)*. Jurnal Ilmiah Vol. 2 No. 2.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan Vol. 1 No. 1.
- Firdaus, M Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Geryan Putra (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu*. Vol 4 (2f).
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitiyarko, Vincentius. 2015. *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Menangani Pandemi Covid-19*.
- Hasibuan. Melayu S.P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Pt. Bumi Aksara,
- Ichsan, Yanuar. 2013. *Manajemen Resiko*. Jakarta : PT Rajawali Press.
- Jensen, Ames. 1976. *The Agency Theory Between Us*. Cambridge Press.
- Kalmi, Ni Ketut Juni dkk. 2019. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)*. Jurnal Universitas Udayana, Bali Vol. 2 No. 3.

- Kisnawati, Baiq. Yuli & Riri. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kec. Hoyo Hilir Kab. Sumbawa Besar*, Jurnal Ilmiah Valid, Vol 15, No 1.
- Kumalasari, Deti. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmiah Valid, Vol. 14 No. 2.
- Kusnadi, H, dkk. 2010. Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku). Malang: Unibraw
- Mahmudi. 2014. Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, Prabu, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Ke-2. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Miftahudin, M. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa PanggungHarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Jurnal Ilmiah Vol. 3 No.12.
- Muntaha, Siti. 2013. *Pengaruh Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ilmu Pemerintah Vol. 4 No. 2.
- Muslimin. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkalan Kabupaten Gowa*. Jurnal Sang Surya Vol. 2 No. 2.
- Nazir, Ahmad. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pebrianti, Nugraha. 2013. *Analisis Multivariate*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari APBN (2014) Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Putra, Zudewa Putra. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)”
- Rismawaty. 2014. Kepribadian dan Etika Profesi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sanusi, Anwar. 2011. *Dasar-Dasar Statistik*. Yogyakarta : ANDI Offset.
- Scott, Garrin. 2015. *Management and Implementation*. New York College.
- Setiyono, Budi. 2018. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Siregar, Beni dan Suparno. 2017. Pengaruh Transparansi dan Hubungan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Valid*, Vol. 2 No. 2.
- Stephanus, Jonathan. 2014. *Bisnis dan Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: C.V. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung ; CV Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta
- Sukmawati, Fitri dan Nurfitriani, Alfi. 2019. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut).
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ubaidillah, Moh. dan Arumsari, Dian. 2019. Pengaruh Tata Kelola terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Profesionalisme SDM dan Integritas sebagai Variabel Intervening.
- Ultafiah, Weny. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
- Umami, Risya. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah* Vol. 5 No. 4.
- Widiyanto, Cahyo. 2013. *Variabel Penelitian*. Jakarta : Pustaka Rakyat.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yudianto, Ivan dan Ekasari. 2017. Pengaruh Penerapan SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 17 No 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Dana Desa